

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN SIAU
BARAT SELATAN KAMPUNG BATUSENGGO
(Suatu Studi Pada Dinas Peikanan, Kabupaten Kepulauan
Siau Barat Tagulandang)**

*Fini Kandati*¹
*Michael Mantiri*²
*Donald Monintja*³

Abstrak

Pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang merupakan bagian dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat untuk dapat bertahan hidup (survive) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan, selanjutnya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri sendiri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara dan kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Siau Barat Selatan Kampung Batusenggo masih belum optimal.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Nelayan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan, atau dalam pengambilan keputusan. Model pendekatan dari bawah mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama, sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama. Model bottom-up memulai dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain model kedua ini menempatkan manusia sebagai subyek. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa "memiliki", dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan masyarakat nelayan, yang nota bene memang untuk kepentingan mereka sendiri. Betapa pun pendekatan bottom-up memberikan kesan lebih manusiawi dan memberikan harapan yang lebih baik, namun tidak lepas dari kekurangannya, model ini membutuhkan waktu yang lama dan belum menemukan bentuknya yang mapan. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau disingkat Kabupaten Sitaro adalah satu Kabupaten kepulauan hasil pemekaran dari Kabupaten Sangihe pada tahun 2007, Provinsi Sulawesi Utara. Ibukota adalah Kelurahan Ondong, Siau Barat. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007. Secara geografis Kabupaten Sitaro memiliki luas wilayah perairan (Laut) 3.245,67 Km² (91%), sedangkan daratan yang terdiri dari pulau-pulau hanya 275,95 Km², dengan demikian kawasan ini dikategorikan sebagai daerah maritime. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sitaro memiliki

potensi alam yang besar terutama disektor Perikanan Laut.

Hasil pengamatan awal penulis melihat adanya kepincangan antara harapan dan kenyataan. Harapan masyarakat nelayan ingin meningkatkan kesejahteraan namun terdapat beberapa masalah seperti kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki masyarakat dari segi keselamatan apakah bisa terjamin para nelayan. dalam mendukung usaha hasil tangkapan dengan alat yang sangat terbatas. Seperti Biaya distribusi yang sangat tinggi, sementara fasilitas seperti pabrik es sebagai tempat penyimpanan ikan masih minim di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pada sisi kemandirian nelayan masih ditemukan adanya nelayan yang hidup dalam garis kemiskinan, program pemberdayaan yang pernah diterima oleh masyarakat nelayan pada tahun-tahun sebelumnya seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, dinilai belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya yang ada di kec.Siau Barat Selatan Kampung Batusenggo.

Fenomena yang terjadi bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum secara konkrit membuat suatu program pemberdayaan khusus bagi masyarakat nelayan, terkesan program pemberdayaan yang terjadi selama ini merupakan program yang diturunkan secara nasional, dengan demikian apabila tidak terdapat program maka secara otomatis tidak terdapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Kepulauan Sitaro. Fenomena ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kelemahan dalam upaya memberdayakan masyarakat nelayan di Kecamatan Siau Barat Selatan, sehingga

apa yang diharapkan bahwa masyarakat nelayan dapat meningkat dalam kesejahteraan, pada kenyataannya hal itu belum dapat diwujudkan.

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah dengan meningkatkan kemandirian masyarakat, pada kenyataannya masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Siau Barat Selatan belum dapat meningkatkan kemandiriannya, hal ini dapat dibuktikan dengan masih tergantungnya kehidupan masyarakat pada mata pencarian sebagai nelayan, karena sesuai dengan pengamatan peneliti ditemui bahwa kehidupan masyarakat nelayan sumber penghasilan masih terbatas, ada istilah yang berkembang dimasyarakat bahwa “mencari sehari untuk hidup sehari” artinya apabila masyarakat nelayan tidak melakukan aktifitas mencari ikan maka dapat dipastikan tidak dapat menghidupi keluarganya, dengan demikian program pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya belum dapat meningkatkan kemandirian masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Ruang lingkup kegiatan pemberdayaan terdiri dari ; Bina manusia, Bina usaha, Bina Lingkungan, dan Bina kelembagaan. a. Bina manusia Lingkungan pemberdayaan dalam bina manusia difokuskan kepada 2 hal :1. Upaya peningkatan kemampuan 2. Upaya peningkatan posisi tawar masyarakat b. Bina usaha Bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal seperti : 1.Peningkatan pengetahuan teknik, utamanya untuk meningkatkan produktifitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk. 2.Perbaikan manajemen untuk meningkatkan

efisiensi usaha,dan pengembangan jejaringan kemitraan. 3.Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimal peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal. 4. Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar dan informasi. c. Bina lingkungan Pembangunan telah membawa dampak negatif sebagai pencemaran lingkungan akibat dari adanya limbah industri dan rumah tangga. Menghadapi kegiatan tersebut, pemberdayaan terhadap kesadaran lingkungan (sumber daya alam dan lingkungan hidup) sudah saatnya memperoleh perhatian yang serius. d. Bina kelembagaan Bina kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi yang jauh lebih baik penting adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu telah berfungsi secara efektif.

Pemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris, power diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan.Menurut Parsons (2005). Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan dan pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. Istilah pemberdayaan juga dapat di artikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang di inginkan oleh individu, kelompok masyarakat luas agar memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitas terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya. Proses pembangunan sumber daya manusia

/masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi dan daya serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Sementara itu. Menurut Rapaport (2005) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas di arahkan agar mampu menguasai atau atas kehidupannya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja dalam pemberdayaan terkandung maka proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Menurut Sumodiningrat (2009:76), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang miliki. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotifasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya, lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditunjukkan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Menurut Paul (2007:11) Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh terahap mereka dan proses hasil pembangunan. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep, mandiri,

partisipasi jaringan kerja serta kekuatan yang terletak pada setiap individu, pemberdayaan pula sebagai proses pengambilan keputusan orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif lebih diberdayakan. Dalam pengertian yang lebih luas pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam mencapai tujuan yang berkelanjutan dalam jangka waktu panjang. Prinsip pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk merealisasikan perubahan positif dan kemandirian hidup yang ada pada diri masyarakat. Prinsip-prinsip Menurut Dr.Oos.M.Anwas (2014:58-59) ini menjadi acuan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan secara benar, Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayan, maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

a.Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat dan potensi yang berbeda. Unsur-unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu di hindari karna bukan menunjukkan ciri dari pemberdayaan.

b.Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah dan potensi klien/sasaran. Hakikatnya, setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri, Proses pemberdayaan juga dituntun berorientasi kepada kebutuhan dan potensi yang dimiliki sasaran. biasanya

pada masyarakat pedesaan yang masih tertutup, aspek kebutuhan, masalah dan potensi tidak nampak. c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk klien/sasaran. d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti gotong royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua, dan kearifan lokal lainnya sebagai jati diri masyarakat perlu ditumbuh kembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal social dalam pembangunan. e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan Tahapan ini dilakukan secara logis dari yang bersifat sederhana menuju yang kompleks.

f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap dan berkesinambungan. kesabaran dan kehati-hatian dari bagian pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama.

g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistic terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2016: 1). Menurut A. Muri Yusuf (2013:329) penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; focus dan multi metode, bersifat alami dan holistic; menguatkan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta di sajikan secara negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang berusaha mendekati kenyataan sosial yang saling membentuk kenyataan dengan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata, gambaran dan catatan dalam tampilan yang apa adanya. Fokus penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kampung Batusenggo pada Dinas Perikanan dengan menggunakan teori dari Riant Nugroho Dwidjowijoto dan Randy R. Wrihatnolo (2007) yang mengemukakan tahapan pemberdayaan ada tiga yaitu ; Pertama dalam tahap ini Penyadaran, yang menjadi target adalah masyarakat diberikan bahwa pemberdayaan itu harus berasal dari diri sendiri ini mendapat informasi actual dan akurat mengenai cara-cara mengembagkan diri dari komunitas. Kedua tahap Pengkapasitasan, bertujuan untuk memapukan masyarakat sehingga memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan lokaranya, dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill

dari masyarakat. Pada tahap ini sekaligus dikenakan dan dibukakan akses kepada sumber kunci terhadap diluar komunitasnya sebagai jembatan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Ketiga pada tahap Pendayaan, masyarakat di berikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, teknik purposive sampling digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyelesaian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Penggunaan purposive sampling ini memberikan kebebasan peneliti dari keterikatan proses formal dalam mengambil sample, yang berarti peneliti dapat menentukan sampling sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan substansi permasalahan. Sampling yang dimaksud bukanlah sampling yang mewakili populasi, melainkan didasarkan pada relevansi informasi. Pemilihan sample tidak berdasarkan kehendak subjektif peneliti, melainkan berdasarkan tema yang muncul di lapangan sesuai dengan substansi penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Perikanan (satu orang)
2. Staf Dinas Perikanan (satu orang)
3. Masyarakat Nelayan (tiga orang)
4. Kepala desa atau opla (satu orang)

Hasil Penelitian

Program pemberdayaan masyarakat di kampung Batusenggo dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat masih

kurang bagus dan mereka menerima bantu alat berupa perahu, mesin, ketinting dan lain-lain. Dalam kaitannya dibuat oleh pemerintah, dan program-program yang di dapat membantu dan melaksanakan pekerjaan mereka juga memiliki masalah-masalah yang dapat menghambat proses pelakasaannya seperti : pembagian alat-alatnya tidak menentu dan hanya diprioritaskan yang memiliki Ktp nelayan maupun berhubungan pribadi namun tidak sedikit juga bahwa implementasi kebijakan dari Dinas Perikanan belum cukup baik dan benar apalagi dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Untuk pemberdayaan masyarakat tidak sesuai dengan kemampuan dan keinginan dari anggota yang ada untuk mengembagkan usaha mereka serta ada bantuan yang menjaminkan keberlangsungan masyarakat. Selain itu di bidang pendidikan formal tetapi juga dilingkungan aparat pemerintah masih belum bagus mulai dari kecamatan sampai kelurahan setiap sekali seminggu dilakukan sosialisasi pembinaan keagamaan dan juga dibentuk pengurus di masing-masingnya program yang akan mereka laksanakan. Peneliti menggunakan teori dari Riant Nugroho Dwidjowijoto dan Randy R.Wrihatnolo (2007) yang mengemukakan tahapan pemberdayaan ada tiga yaitu ; Pertama dalam tahap ini Penyadaran, yang menjadi target adalah masyarakat diberikan bahwa pemberdayaan itu harus berasal dari diri sendiri ini mendapat informasil actual dan akurat mengenai cara-cara mengembagkan diri dari komunitas. Kedua tahap Pengkapasitasan, bertujuan untuk memapukan masyarakat sehingga memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan

diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan lokalnya, dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill dari masyarakat. Pada tahap ini sekaligus dikenakan dan dibukakan akses kepada sumbernya kunci terhadap diluar komunitasnya sebagai jembatan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Ketiga pada tahap Pendayaan, masyarakat di berikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya.

Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan maka berdasarkan uraian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kampung Batusenggo telah di kemukakan dari bab-bab sebelumnya yang didukung data lapangan dan teori yang ada maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dalam proses penyadaran sudah cukup bagus sehingga pemerintah menyikapi keadaan lapangan, sebab apa yang sudah mereka lakukan itu membuahkan hasil yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada, semenjak adanya penyadaran tersebut para nelayan sudah mampu membuat proposal dan mereka juga mendapat hasil yang sudah mereka buat, seperti pencairan dana dari pemerintah berupa alat/barang tapi rata-rata semua tidak sesuai dengan permintaan, contohnya seperti jumlah barang yang diminta 10 unit perahu dan 5 ketinting dan hanya yang cairkan setengahnya.

Dalam Proses pengakapsitan masih belum bagus sehingga masyarakat berharap pemerintah lebih optimal lagi

dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang ada agar supaya tidak focus ke satu kampung saja sehingga masyarakat lain tidak mengiri dan diberikan sama rata. Dalam proses pendayaan dimana para nelayan bergerak dalam bidang masing-masing dan mencoba mandiri untuk bisa berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah atau pemerintah desa. Sehingga para nelayan mendapatkan dorongan oleh pihak dinas perikanan untuk membuahkan hasil yang memuaskan. Dalam Pemberdayaan, Dinas Perikanan melakukan pelatihan terhadap masyarakat nelayan terkait dengan pembuatan alat tangkap gill net. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh nelayan, sebab semua dari nelayan mengetahui apa itu alat tangkap gill net. Perubahan serta manfaat yakni masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang cara pembuatan alat tangkap gill net dan juga tambahan skill atau keterampilan yang mereka miliki sampai sekarang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran terkait Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kampung Batusenggo Kec. Siau Barat Selatan yaitu :

1. Dinas Perikanan. Untuk program ini pemberdayaan nelayan harus lebih sering melakukan penyuluhan atau sosialisasi, setidaknya dana 1 (satu) Tahun dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Kegiatan penyuluhan jangan hanya dilakukan disatu Kampung atau desa hendaknya dilakukan disemua tempat yang ada.
2. Pemerintah desa. Untuk lebih giat lagi memperhatikan lingkungan

sekitar, seperti keadaan kebersamaan erta ekonomi masyarakat setempat.

3. Masyarakat. Untuk lebih menyadari bahwa mandiri itu perlu untuk keberhasilan yang kita dapat demi masa kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas,O.M.2014. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung : Alfabeta.
- Edi, S. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat . Bandung : PT Refika Aditama.
- Hamzah A. 2015. Jurnal skripsi Pemberdayaan Ekonomi Nelayan PT. Karya Masyarakat Madidir Dhuafa Di Desa Tanjung Pasir Kabupaten tangerang.
- MI Hanfri. 2009. Jurnal Skripsi Hubungan Modal Sosial Dengan Kemiskinan Masyarakat Desa Panimbang Jaya Pandenglang.
- Mardikanto. T. 2012. Konsep pemberdayaan masyarakat. Surakarta: Penerbit TS
- Mardikanto.T.2017.Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Bandung. Alfabeta.
- Paul, S. 2007. Community partisipation in development project.The World Bank Experience. Washington D.C: The World bank.
- Parsons, R. J., James, J. dan Santos, H. 2005. The integration of social work practice. California: Brooks/cole.
- Rappaport, J. 2005. Studies in Empowerment. USA: Introduction on the issue,
- prevention in Human issue.
- Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi dan Nyoman, I.2005. Pencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama.
- Sumodiningrat, G. 2009. Mewujudkan kesejahteraan bangsa menanggulangi kemiskinan dengan prinsip Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT.Alex Media Komputindo.
- Sujarweni,W.2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Suyanti, 2010. Upaya pengurusan tempat pelelangan ikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Nelayan di pasar Madang Kecamatan Kota agung Kabupaten Tanggamus, Skripsi.
- Syafiie, I. K. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Van Den Ban, A. W. Dan H. S. Hawkins. 2005. Agricultural Extension (second edition). Blackwell Science, Osney Mead, Oxford OX2 OEL.
- Wrihatnolo, R. dan Dwidjowijoto, R. N. 2007. Manajemen Pemberdayaan. Jakarta: Ekekmedicomantindi.
- Yusuf. M. A. 2013 Metode Penelitian Kualitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan. Padang: Prenadamedia Group.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Petani Garam Pemasak.